

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku:

- Abdul Rasyid Saliman dan Adisuputra, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan, Teori dan Contoh Kasus, Edisi Kedelapan*, (Jakarta: Kencana, 2021).
- Abi M. Radjab, *Buku Ajar Hukum Perizinan*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, (Bandung: Kalam Media, 2015).
- Ade Priaman S.M. dan Anindita Dinar Susanti, *Izin Usaha Dan Izin Komersial/Operasional* (Jakarta: Pusdiklat BKPM, 2019).
- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019)
- Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Buku Peraturan-Peraturan Umum Terkait Penanaman Modal dan Kawasan Ekonomi Khusus (*Law and regulations related to Investment and special economic Zones*)
- Marhaeni Ria Siombo, *Dasar-Dasar Hukum Lingkungan Dan Kearifan Masyarakat*, (Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Atma Jaya, 2019), Hlm 29
- Muhammad Iqbal Hasan, *Hukum Investasi Internasional, Teori dan Implementasi*. (Bandung: Refika Aditama, 2021).
- Mohammad Askin, *Seluk Beluk Hukum Lingkungan, Edisi Kedua*, (Jakarta: Unas Press-Universitas Nasional, 2016)
- Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010).
- N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge Disunting Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Surabaya: Yuridika, 1993).
- Penelitian Revitalisasi Instansi Penanaman Modal Di Pusat dan Daerah Dalam Rangka Pemberian Pelayanan, BKPM Tahun Anggaran 2007.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), Hlm. 84

Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia Edisi Kedua*. (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020).

Shinta Diana Putri, Artikel Perizinan, Kebijakan Perizinan Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Di Indonesia.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Persada, 2013).

Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Hlm 78

### **B. Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (1) samapai ayat (5).

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 Tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal dalam Negeri jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 Tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal dalam Negeri.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Lampiran III Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 5 Tahun 2021.

Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal.

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal.

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal.

### C. Sumber-sumber lainnya:

Ardimansyah, *Implikasi Penetapan Izin Lingkungan Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Pertambangan*, ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124, Al'Adl, Volume X Nomor 2, Juni 2018, Di Akses Pada Hari Sabtu, Tanggal 20-5-2023, Pukul 9.55 WIB

Diana Yusyanti, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 310No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016, Di Akses Pada Hari Kamis, Tanggal 09/02/2023, Pukul 22.31 WIB

Fine Ennardrianita, Isharyanto, dan I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi (vol 6 no 2) Politik Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Saat Berlaku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, Hlm 39, Di Akses Pada Hari Sabtu, Tanggal 20-5-2023, Pukul 10.07 WIB

Joan kuyek, *Canadian Mining Law and the impacts on Indigenous People Lands and Resource, Backgrounder for presentation to the North American Indigenous Mining Summit. July 28, 2005*, Hlm 1.

Josep F. Castrlli. *Environmental Regulation of the Mining Industry In Canada: An Update of Legal and regulatory Requirements*, 1999

Laurensius Arliman S, *Eksistensi Hukum Lingkungan Dalam Membangun Lingkungan Sehat Di Indonesia*, Jurnal Lex Librum, Vol. V, No. 1, Desember 2018, Hlm 768

[www.bkpm.go.id](http://www.bkpm.go.id) Di Akses Pada Hari Jumat, Tanggal 8 Juli, Tahun 2022, Pukul 15.30 WIB

<https://ekosistem.co.id/batu-bara/> Di Akses Pada Hari Kamis, Tanggal 09/02/2023, Pukul 22.05 WIB

<https://www.gramedia.com/literasi/kerangka-teori/> Di Akses Hari Selasa, Tanggal 28/06/2022, Pukul 18.23 WIB

<https://id.wikipedia.org/> Di Akses Pada Hari Kamis, Tanggal 09/02/2023, Pukul 22.43 WIB

[penelitianilmiah.com/kerangka-konsep/](http://penelitianilmiah.com/kerangka-konsep/) Di Akses Pada Hari Selasa, Tanggal 28/06/2022, Pukul 20.42 WIB

<http://repository.untag-sby.ac.id/> Di Akses Pada Hari Kamis, Tanggal 09/02/2023, Pukul 21.03 WIB, Hlm 9

<https://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum-2.html/> Di Akses Pada Hari Kamis, Tanggal 09/02/2023, Pukul 22.53 WIB



## LEMBAR HASIL UJI TURNITIN

23:37

← PERLINDUNGAN HUK...

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP IZIN USAHA  
PERTAMBANGAN BATU BARA DI INDONESIA BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG  
PENANAMAN MODAL**

ORIGINALITY REPORT

<b>9%</b>	<b>14%</b>	<b>8%</b>	<b>8%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	www.jogloabang.com <small>Internet Source</small>	2%
<b>2</b>	repositori.usu.ac.id <small>Internet Source</small>	1%
<b>3</b>	repositoryfikes.uia.ac.id <small>Internet Source</small>	1%
<b>4</b>	www.dpr.go.id <small>Internet Source</small>	1%
<b>5</b>	elibs.unigres.ac.id <small>Internet Source</small>	1%
<b>6</b>	repository.unair.ac.id <small>Internet Source</small>	1%
<b>7</b>	Submitted to UPN Veteran Jakarta <small>Student Paper</small>	1%
<b>8</b>	digilib.unila.ac.id <small>Internet Source</small>	1%
<b>9</b>	repo.unand.ac.id <small>Internet Source</small>	1%
<b>10</b>	qdoc.tips <small>Internet Source</small>	1%
<b>11</b>	www.bkpm.go.id <small>Internet Source</small>	1%

Exclude quotes  On      Exclude matches  < 1%

Exclude bibliography  On